



**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN
DALAM LAPORAN TAHUNAN
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI
Periode 2009-2011)**

SKRIPSI

Oleh

**Tiara Kusumawati
090810301235**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN
DALAM LAPORAN TAHUNAN
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI
Periode 2009-2011)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

**Tiara Kusumawati
NIM 090810301235**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikanku banyak anugerah dalam hidup semoga akan selalu menuntutku untuk meniti jalan yang di Ridho-Nya.
2. Kedua Orangtuaku tercinta, Husniwati dan Heri Susanto terima kasih atas ketulusan, kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah keberhasilanku;
3. Adik dan kakakku tersayang Rudi Hermawan dan Dika Susanto, terima kasih karena kalian selalu memberi senyuman, semangat dan doa, serta terima kasih juga kepada seluruh keluarga besarku atas doanya kepadaku;
4. Guru-guruku dari TK hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar;
5. Dosen Pembimbingku Dr. Yosefa Sayekti. SE., M. Com, Ak dan Novi Wulandari. SE., M. Acc. Fin, Ak;
6. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah

(QS. Yusuf: 87)^{*}

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang dialami oleh suatu kaum, sehingga mereka sendiri yang berusaha merubah apa yang mereka alami

(QS. Ar Ra'du: 11)^{*}

^{*}Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota Surabaya.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Kusumawati

NIM : 090810301235

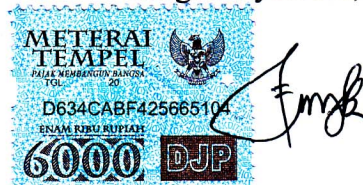
Jurusan : Akuntansi Reguler-Pagi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI Periode 2009-2011) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Mei 2013

Yang menyatakan,



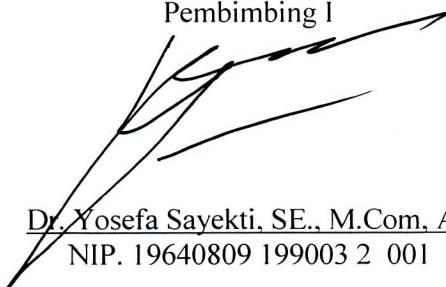
Tiara Kusumawati
Nim. 090810301235

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DALAM
LAPORAN TAHUNAN (STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI PROPER
DAN BEI PERIODE 2009-2011)

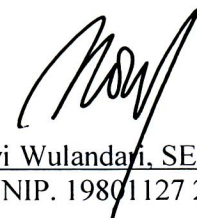
Nama Mahasiswa : Tiara Kusumawati
N I M : 090810301235
Jurusan : S-1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 12 April 2013

Pembimbing I




Dr. Yosefa Sayekti, SE., M.Com, Ak
NIP. 19640809 199003 2 001

Pembimbing II



Novi Wulandari, SE., M.Acc. Fin, Ak
NIP. 19801127 200501 2 003

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak.
NIP 19720416 200112 1 001

SKRIPSI

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN
DALAM LAPORAN TAHUNAN
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI
Periode 2009-2011)**

Oleh

Tiara Kusumawati
NIM 090810301235

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Yosefa Sayekti, SE., M.Com, Ak
Dosen Pembimbing II : Novi Wulandari, SE., M. Acc. Fin, Ak

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul:

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DALAM LAPORAN TAHUNAN

**(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI
Periode 2009-2011)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tiara Kusumawati
NIM : 090810301235
Jurusan : Akuntansi

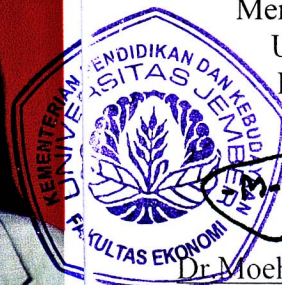
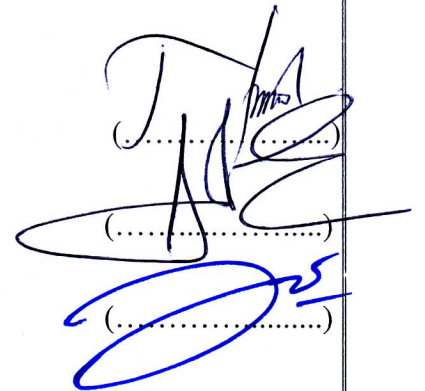
Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

24 Juni 2013


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc., Ak
NIP 19830624 200604 2 001
Sekretaris : Drs. H. Djoko Supatmoko, MM., Ak
NIP 19550227 198403 1 001
Anggota : Drs. Imam Mas' ud, MM., Ak
NIP 19591110 198902 1 001



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

Tiara Kusumawati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Pengukuran tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan didasarkan pada GRI (2006). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di PROPER dan BEI tahun 2009, 2010, dan 2011. Total sampel penelitian adalah 90 laporan tahunan perusahaan yang dipilih secara *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Namun, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

Kata kunci: GRI, pengungkapan tanggung jawab lingkungan, struktur kepemilikan

Tiara Kusumawati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

This research is aimed to examine the effect of the ownership structure on the level of environmental responsibility disclosure in the annual report. The ownership structure consists of governmental ownership, managerial ownership, foreign ownership, and institutional ownership. The measurement on the level of environmental responsibility disclosure is based on the GRI (2006). This research uses secondary data from annual reports of listed companies in PROPER and BEI in 2009, 2010, and 2011. The total study sample was 90 companies whose annual reports are selected by purposive sampling. The research method used is the classical assumption testing and hypothesis testing with multiple linear regression method. The results of the research indicate that the variables of governmental ownership, foreign ownership and institutional ownership have a significant positive effect on the level of environmental responsibility disclosure. However, the managerial ownership variable has not significant effect on the level of environmental responsibility disclosure.

Key words: *GRI, environmental responsibility disclosure, ownership structure*

RINGKASAN

Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI Periode 2009-2011); Tiara Kusumawati, 090810301235; 2013; 76 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Maka aktivitas pengelolaan lingkungan perlu dipikirkan karena pengelolaan yang buruk akan merusak lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan perusahaan juga memerlukan suatu bentuk pelaporan informasi untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan perusahaan untuk pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pelaporan mengenai pengungkapan aktivitas tanggung jawab lingkungan perusahaan perlu dilaporkan dalam laporan tahunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Struktur kepemilikan ini terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen sedangkan tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan sebagai variabel dependen.

Teknik pengambilan sampel adalah dengan metode *purposive sampling*. Sampel perusahaan yang terdaftar di PROPER dan BEI periode 2009-2011 sebanyak 90 laporan tahunan perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian maka menggunakan uji asumsi klasik, yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Metode analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Namun, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI Periode 2009-2011) ” yang telah disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Dr. Yosefa Sayekti. SE., M. Com, Ak dan Novi Wulandari. SE., M. Acc. Fin, Ak, selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Wahyu Agus W., S.E., M.Si., Ak selaku dosen wali dan Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang turut membantu dalam memberikan informasi penting yang berkaitan dengan perkuliahan maupun sampai penyelesaian tugas akhir.

6. Kedua Orangtuaku tercinta Drs. Heri Susanto dan Husniwati yang dengan sabar dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang dan dukungan berupa materi maupun semangat dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Adik dan kakakku tersayang Rudi Hermawan dan Dika Susanto yang selalu memberikan keceriaan dalam hari-hariku, dan memberikan dukungan semangat dan doanya kepadaku.
8. Sahabat-sahabatku Dwina Oni Susanto, Wiwin Dwi Y, Eka Mia, Irin Cahyawati, Ertak Erlinda, dan Nyoman Ajeng banyak cerita bersama kalian selama ini, terima kasih atas semangat, keceriaan dan juga telah mengisi kehidupanku dari awal kuliah sampai sekarang. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
9. Teman-Teman S1-Akuntansi : Wahyu, Ditya , Ari Fidya, Catrin dan Vindy yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini.
10. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini, sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca.

Jember, 13 Mei 2013

Tiara Kusumawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN.....	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Stakeholder.....	8
2.1.2 Teori Legitimasi.....	10
2.1.3 Struktur Kepemilikan.....	11

2.1.4	Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER).....	12
2.1.5	Tanggung Jawab Lingkungan.....	14
2.1.6	Akuntansi Lingkungan.....	17
2.1.7	Pengungkapan Tanggung Jawab lingkungan.....	18
2.1.8	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan	19
2.2	Penelitian Terdahulu.....	30
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	37
2.4	Hipotesis Penelitian.....	38
2.4.1	Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan.....	38
2.4.2	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan.....	39
2.4.3	Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan.....	40
2.4.4	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan.....	41
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	43
3.1	Jenis Sumber Data.....	43
3.2	Populasi dan Sampel.....	43
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	44
3.3.1	Variabel Independen.....	44
3.3.2	Variabel dependen.....	45
3.4	Metode Analisis Data.....	46
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	46
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	46

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
3.4.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	49
3.4.5 Uji F.....	50
3.4.3 Uji T.....	50
3.5 Kerangka Pemecahan Masalah.....	51
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
4.2 Hasil Analisis Data.....	53
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	53
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62
4.5 Uji F.....	62
4.6 Uji T.....	63
4.7 Pembahasan	64
4.7.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan.....	64
4.7.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan.....	65
4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan.....	66
4.7.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan.....	67
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Keterbatasan.....	69

5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Kriteria Kinerja Lingkungan pada Peringkat PROPER.....	13
2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	33
4.1 Distribusi Pengambilan Sampel.....	52
4.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel – Variabel Penelitian	53
4.3 Hasil Uji Multikolonieritas.....	58
4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemiiran Teoritis.....	38
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	53
4.1 Hasil Uji Normalitas.....	57
4.2 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Indeks Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan
2. Nama Perusahaan yang Digunakan dalam Penelitian
3. Data Perusahaan Sampel yang Digunakan dalam Penelitian
4. Hasil Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan
5. Hasil SPSS dalam penelitian

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini sering terjadi pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat. Dari hasil polling, publik memandang kegiatan bisnis dan perusahaan sebagai kontributor terbesar terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini (Dunlap dan Scarce dalam Lindrianasri, 2007). Kondisi ini yang menimbulkan keresahan masyarakat terhadap kepedulian perusahaan yang kurang terhadap lingkungan. Handayani (dalam Wijayanti, 2012) menyatakan bahwa permasalahan lingkungan adalah faktor penting yang harus dipikirkan karena pengelolaan lingkungan yang buruk juga terkait dengan berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti pencemaran air karena limbah industri, banjir dan tanah longsor yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, kasus PT Freeport di Irian Jaya, serta banjir lumpur di Sidoarjo, yang sampai sekarang belum tertangani dengan baik.

Maka pelaporan mengenai aktivitas lingkungan dalam perusahaan perlu diungkapkan. Menurut Sadjirto (dalam Amirawati, 2012), laporan mengenai aktivitas lingkungan merupakan salah satu jenis informasi non-keuangan, namun sangat penting peranannya bagi organisasi. Bagi perusahaan, laporan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dan dianggap sebagai suatu langkah positif bagi investor maupun *stakeholders* terutama berkaitan dengan image perusahaan. Almilia (2010) menyatakan bahwa pemahaman investor tentang informasi atau pengungkapan apa saja yang disajikan perusahaan merupakan informasi penting bagi investor dalam melakukan pengambilan keputusan.

Dalam pengungkapan aktivitas lingkungan pemerintah berperan aktif melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) dengan Peraturan Bapepam –LK Nomor : X.K.6 lampiran keputusan Nomor :

Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 66 bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal 74 ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran, pasal 74 ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 74 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Desiandwi (dalam Wijayanti, 2012) pengungkapan tanggung jawab lingkungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan sehingga akuntansi berupaya untuk menjembatani kecenderungan tersebut dalam akuntansi lingkungan (*environmental accounting*). Nuraini (dalam Wijayanti, 2012) juga menyatakan bahwa akuntansi mempunyai peran penting sebagai media pertanggungjawaban publik (*public accountability*) atas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan karena *disclosure* biaya lingkungan telah lama dirumuskan.

Pengungkapan informasi perusahaan juga didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf keduabelas

yaitu entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.05 tahun 2011 pasal 1 bahwa program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkungan yang selanjutnya disebut PROPER adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.05 tahun 2011 pasal 2 ayat (1) PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan. Pasal 2 ayat (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan PROPER. Pasal 2 ayat (3) Pemberian PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dan didukung juga dengan pasal 3 ayat 1 bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham dimiliki. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 16 bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab: a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerjaan; dan f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 17 yaitu Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengungkapan tanggung jawab lingkungan oleh Wijayanti (2012), Sudarno (2004), Suratno, Darsono, Mutmainah (2007) dan Lindrianasari (2007) menunjukkan hasil yang positif pada *environmental performance*, ukuran perusahaan, kinerja ekonomi, status permodalan dan sektor industri. Sedangkan penelitian Hariyanto (2009) dan Suhardjanto dan Miranti (2009) bahwa profitabilitas, dan tipe industri menunjukkan hasil yang positif.

Jadi berdasarkan salah satu variabel pada penelitian Wijayanti (2012) yaitu status permodalan maka penelitian ini akan mengembangkan kembali variabel status permodalan secara lebih detail menjadi struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan menjadi variabel dalam penelitian ini juga didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mana setiap penanam modal bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Struktur kepemilikan pada penelitian ini terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional karena kepemilikan saham perusahaan mendorong manajemen untuk menekankan pentingnya analisis perilaku perusahaan dengan memperhatikan lingkungan yang diharapkan agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan teori legitimasi dan peraturan pemerintah. Selain itu penelitian ini juga didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu peneliti Cormier, Magnam dan Van Velthoven (dalam Chariri, 2008) dan Karim, Lacina dan Rutledge (2006) yang menggunakan variabel kepemilikan institusi, dan kepemilikan asing sebagai variabel independen, maka penelitian ini akan menggunakan kembali variabel penelitian sebelumnya dengan menambah variabel kepemilikan pemerintah dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan obyek penelitian dan periode pemangatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di PROPER dan BEI periode 2009-2011. Peneliti memilih perusahaan yang terdaftar di PROPER sebagai obyek penelitian karena PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung

Jawab Lingkungan dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI Periode 2009-2011)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan?
- b. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan?
- c. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan?
- d. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya untuk menambah informasi.
- b. Bagi perusahaan/emiten

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan perusahaan tentang pentingnya pertanggungjawaban lingkungan dalam perusahaan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kekurangan mengenai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pertanggungjawaban lingkungan dalam perusahaan terhadap lingkungan yang telah diatur dalam BAPEPAM-LK, Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan informasi terkait pertanggungjawaban lingkungan dalam perusahaan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Istilah *stakeholder* dari definisi Gray et al (dalam Iryanie, 2009) menyatakan bahwa *stakeholders* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para *stakeholder* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal dan lain-lain. Ghozali dan Chariri (dalam Iryanie, 2009) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri dalam Badjuri, 2011). Teori *stakeholder* digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kelompok-kelompok yang mana perusahaan harus bertanggungjawab (Moir dalam Badjuri, 2011).

Menurut Ulum, Ghozali dan Chariri (2008) Teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan.

Kasali dalam Wibisono (2007) membagi *stakeholder* menjadi sebagai berikut:

a. *Stakeholders* Internal dan *stakeholders* eksternal

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang didalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada diluar

lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *sosial responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

b. *Stakeholders* primer, sekunder dan marjinal

Tidak semua elemen dalam *stakeholders* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholder* yang paling disebut *stakeholders* primer, *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu-waktu.

c. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

d. *Proponents*, *apponents*, dan *uncommitted*

Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

e. *Silent majority* dan *vokal minority*

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara *silent* (pasif).

Terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu (Iryanie, 2009):

- a. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka,
- b. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan,
- c. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan.
- d. LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah” (Deegan dalam Iryanie, 2009). Dowling dan Preffer (dalam Chariri, 2008) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, mereka menyatakan:

Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Guthrie dan Parker (dalam Badjuri, 2011) menyarankan bahwa organisasi mengungkapkan kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi atas usaha perusahaan (Hui dan Bowrey dalam Badjuri, 2011).

Gray, Khouhy dan Lavers (dalam Chariri, 2008) berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori *stakeholder* merupakan perspektif teori yang berada

dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan dan manajemennya bertindak dan membuat laporan sesuai dengan keinginan dan power dari kelompok *stakeholder* yang berbeda (Ullmann dalam Chariri, 2008) teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (dalam Chariri, 2008) memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan sebagai berikut:

Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Patten (dalam Chariri, 2008) menyimpulkan bahwa ancaman terhadap legitimasi perusahaan merupakan faktor pendorong perlunya pengungkapan lingkungan. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs, 1990; Dowling dan Pfeffer, 1975; O' Donovan, 2002; dalam Chariri 2008).

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Struktur Kepemilikan adalah perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah yang dimiliki oleh investor (Jahera dan Aurburn dalam Indrayani, 2009). Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang (Ituriaga dan Sanz dalam Faizal, 2004 dalam Kristanto, 2010) yaitu:

- a. Pendekatan keagenan

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

b. Pendekatan informasi asimetri

Struktur kepemilikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui pengungkapan informasi

Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan (Indrayani, 2009). Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki (Indrayani, 2009).

2.1.4 Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER)

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.05 tahun 2011 pasal 1 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian dari PROPER, yaitu:

PROPER adalah pengelolaan lingkungan hidup terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Tujuan penerapan instrumen PROPER adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan PROPER periode 2009-2010 kali ini telah menerapkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga dalam peringkat kinerja penataan dikelompokkan dalam 5 (lima) peringkat warna, sehingga tidak ada lagi peringkat Biru (-) atau Biru Minus dan Merah (-) atau Merah Minus seperti pelaksanaan PROPER periode 2006-2007.

Berikut adalah kriteria peringkat PROPER berdasarkan warna atas penilaian kinerja perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang PROPER No.5 tahun 2011 pasal 4, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Lingkungan pada Peringkat PROPER

Peringkat Warna	Definisi
Emas	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat;
Hijau	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (<i>Rreduce, Reuse, Recycle, dan Recovery</i>) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik;
Biru	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Merah	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Hitam	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi
-------	--

Sumber: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.05/2011

2.1.5 Tanggung Jawab Lingkungan

Saat ini, dampak degradasi lingkungan secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga informasi mengenai tanggung jawab lingkungan hendaknya menjadi perhatian bersama demi terwujudnya lingkungan yang ramah (*green environmental*) dan dipenuhinya kebutuhan masyarakat oleh perusahaan yang ramah pula (*green companies*) (Handayani dalam Wijayanti, 2012). Dunlap dan Scarce (dalam Lindrianasari, 2007) menyatakan bahwa dari hasil polling, publik memandang kegiatan bisnis dan perusahaan sebagai kontributor terbesar terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Terkait dengan pertanggungjawaban lingkungan maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kepedulian kepada lingkungan sebenarnya juga muncul akibat berbagai dorongan dari pihak luar perusahaan (Berry dan Rondinelli dalam Ja'far dan Arifah, 2006), antara lain: pemerintah, konsumen, *stakeholder* dan persaingan. Penelitian Pflieger et al (dalam Ja'far dan Arifah, 2006) menunjukkan bahwa

usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya ketertarikan pemegang saham dan *stakeholder* terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab dimata masyarakat.

Perundang-undangan yang mengacu pada pertanggungjawab lingkungan yaitu :

- a. Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 pada pasal 16 yaitu setiap penanam modal bertanggung jawab:
 - 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
 - 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - 5) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerjaan; dan
 - 6) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 pada pasal 17 yaitu Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan

lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat 1 yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 23 sebagai berikut :

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Pasal 26 sebagai berikut :

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c.meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 - 1. Pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
 - 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batubara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 pasal 112B yaitu

perpanjangan kontrak dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) paling sedikitnya memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Persyaratan teknis salah satunya adalah laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, sedangkan persyaratan lingkungan memenuhi kesanggupan untuk memetahui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup, dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*)

Akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) adalah suatu istilah yang berupaya untuk menspesifikasikan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos “lingkungan” di dalam praktek bisnis perusahaan dan pemerintah (Lindrianasari, 2007). Menurut Winarno (2007) akuntansi lingkungan *environmental accounting* atau EA adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*enviromental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak (*impact*) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Lindrianasari (2007) menyatakan akuntansi lingkungan juga dapat dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan. Aktifitas yang dapat dilakukan sehubungan dengan konservasi lingkungan: (Lindrianasari, 2007)

- a. Konservasi terhadap kondisi yang berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup dan lingkungan hidup yang berasal dari populasi udara, populasi air, pencemaran tanah, kebisingan, getaran, bau busuk dan lain sebagainya.

- b. Konservasi terhadap kondisi yang berpengaruh secara menyeluruh seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, serta pencemaran air laut.
- c. Konservasi terhadap sumber daya (termasuk air). Konservasi ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, mengendalikan sampah dari kegiatan produksi perusahaan, penggunaan material dari hasil daur ulang dan lain sebagainya.
- d. Konservasi lain yang berhubungan.

2.1.7 Pengungkapan Tanggung Jawab lingkungan (*Environmental Responsibility Disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan/berkepentingan (*stakeholder*) (Wijayanti, 2012). Menurut Sudarno (2004:3) perusahaan perlu mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan, baik dalam kriteria keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan keuangan bisa berupa pengorbanan yang ditanggung perusahaan ataupun masyarakat terkait tanggung jawab lingkungan atas aktivitas perusahaan. Sedangkan, pengungkapan non keuangan berupa kegiatan yang telah atau yang akan dilaksanakan terkait masalah lingkungan.

Pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang sering disebut juga *environmental disclosure* adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Hariyanto, 2009). Menurut Winarno (2007) perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap lingkungan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Hariyanto (2009) semakin banyak *item environmental disclosure* yang dimuat dalam laporan tahunan perusahaan, berarti semakin besar indeks *environmental disclosure*.

Dalam UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pada pasal 66 menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal 74 ayat (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran, pasal 74 ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 74 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

2.1.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab lingkungan sebagai berikut:

a. Profitabilitas

Menurut Munawir (dalam Fransiska, 2012) pengertian dari profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dan sejauh mana keefektifan pengelolaan perusahaan. Karena alasan keberadaan suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba, rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang paling signifikan. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Menurut Hariyanto (2009:3) tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan perusahaan dengan perolehan laba yang lebih besar akan teori keagenan, perusahaan yang memperoleh laba lebih besar akan menyediakan informasi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu semakin tinggi profit yang diterima perusahaan, asumsikan turut berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (Wijayanti, 2012). Manfaat Rasio Profitabilitas menurut Munawir (dalam Fransiska, 2012), yaitu :

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, dan
- e. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan (Rini, 2012). Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil (Rahajeng, 2010). Menurut Sudarno (2004:7) dampak yang ditimbulkan perusahaan besar lebih luas dan menjadi perhatian banyak pihak sehingga pertanggungjawaban lingkungan berperan dalam menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholder*. Berdasarkan teori *stakeholder* pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki penjualan besar (akibatnya pelanggannya lebih banyak), modalnya lebih besar (investor/kreditor lebih banyak), karyawan lebih banyak

sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak yang berkepentingan juga banyak pula.

c. Status Permodalan (Capital)

Menurut Wijayanti (2012) pada teori *stakeholder* dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan cenderung berperan cukup kuat dalam operasionalisasi perusahaan. Oleh karena itu, modal yang didapat juga diklasifikasikan berdasar pihak penanaman modalnya diklasifikasikan menjadi penanaman modal asing (PMA) dan non penanaman modal asing (non PMA). Pihak non PMA dipilah lagi menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Badan usaha milik negara (BUMN). Menurut, Almilia dan Wijayanto (dalam Wijayanti, 2012) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kategori investasi oleh asing diduga lebih memperhatikan tanggung jawab lingkungannya dibandingkan yang investor dalam negeri. Beberapa negara asing seperti Jepang telah mewajibkan pengungkapan tanggung jawab lingkungannya sedangkan di Indonesia hal tersebut masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Menurut Susanto (1992); Fitriani (2001), dalam Almilia dan Retrinasari (2007:6) ada beberapa alasan perusahaan yang memiliki status permodalan asing lebih banyak pengungkapan lingkungannya. Pertama, mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya diluarnegeri. Kedua, mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga terdapat permintaan informasi yang lebih besar dari pelanggan, pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan dengan status penanaman yang berbeda akan memiliki *stakeholders* yang berbeda, sehingga tingkat kelengkapan pengungkapan yang harus dilakukan pun berbeda.

d. *Environmental Performance*

Environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*) (Hariyanto, 2009). Preston (dalam Lindrianasari, 2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan melakukan pengungkapan yang tinggi memposisikan mereka sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas yang berguna dan kualitas pengungkapan ini juga didorong legitimasi terhadap masyarakat. Menurut Guthrie dan Parkers's (dalam Lindrianasari, 2007) untuk perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang rendah dengan kualitas pengungkapan yang buruk, umumnya adalah perusahaan yang memang memiliki keterbatasan terhadap item-item yang harus diungkapkan. Ditambah lagi, perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk, akan semakin tidak mungkin melakukan pengungkapan sukarela yang banyak. Pengungkapan sukarela akan banyak dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kinerja yang baik (Gray et. al., 1995; Freedman dan Wasley, 1990; Parker, 1986 dalam Lindrianasari, 2007).

e. Tipe Industri

Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu industri yang *high-profile* dan industri yang *low-profile* (Diba, 2012). Robert (1992) dalam Anggraini (2006) dalam Diba (2012) menggambarkan industri yang *high-profile* sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan (*consumer visibility*), tingkat risiko politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya. Industri *low-profile* adalah kebalikannya. Perusahaan ini memiliki tingkat *consumer visibility*, tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya meskipun dalam

melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya. Pada penelitian (Suhardjanto dan Miranti, 2009) yang menguji pengaruh tipe industri yang didapat hasil bahwa tipe industri yang berpotensi menghasilkan polusi akan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Tipe industri yang diukur meliputi, jasa, keuangan, manufaktur dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Suhardjanto dan Miranti (2009) perusahaan manufaktur menduduki presentase tertinggi atas pelaporan informasi lingkungannya diikuti keuangan dan jasa. Menurut Hanifa dan Cooke (2005) dalam Suhardjanto dan Miranti (2009:14) hal ini dikarenakan informasi yang disediakan perusahaan harus sesuai dengan industrinya berada.

Berdasarkan salah satu variabel diatas yaitu status permodalan maka peneliti akan mengembangkan secara detail variabel status permodalan menjadi struktur kepemilikan, yang terdiri dari :

a. Kepemilikan Pemerintah

Menurut Dwi K. (2012) Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan pemerintah akan lebih sensitif secara politik karena kegiatan-kegiatan pemerintah akan lebih diperhatikan publik. Menurut Fransiska (2012) melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi dalam Diba, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. UU No.19

tahun 2003 pasal 1 ayat 2 yaitu Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pemerintah berkepentingan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku agar kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu (Satyo dalam Suaryana, 2010). Guthrie dan Parker (dalam Nurkhim, 2009) menyarankan bahwa organisasi mengungkapkan kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi atas usaha (Hui dan Bowrey dalam Nurkhim, 2009). Kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah mendorong pengungkapan tanggung jawab lingkungan karena pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman perusahaan terkait tanggung jawab lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak regulator memiliki kekuatan untuk menekan pihak perusahaan dalam meminimalisasikan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha mereka (Lindrianasari, 2007). Peraturan perundang-undangan pemerintah terkait tanggungjawab lingkungan sebagai berikut:

1. UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pada pasal 66 menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Pasal 74 sebagai berikut :
 - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan

- (2) Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
 - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
2. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat 1 yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 23 sebagai berikut :

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Pasal 26 sebagai berikut :

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c. meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :

1. Pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batubara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 pasal 112B yaitu perpanjangan kontrak dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) paling sedikitnya memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Persyaratan teknis salah satunya adalah laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, sedangkan persyaratan lingkungan memenuhi kesanggupan untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 05 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan (Faizal, 2004). Jensen dan Meckling (dalam Widarjo, Bandi dan Hartoko, 2010) mengemukakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha

meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula.

Menurut Soesetio (2008) kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* karena dengan memiliki saham perusahaan, diharapkan manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi dari kepemilikan saham. Proses ini dinamakan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan. Salah satu cara bagi manajer untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dalam laporan tahunan, strategi bisnis manajemen dan kinerja perusahaan dengan lebih lengkap, termasuk kinerja lingkungan guna pengambilan keputusan (Sudarno, 2004). Menurut Winarno (2007) perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap lingkungan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat.

c. Kepemilikan Asing

Menurut UU Nomor 25 tahun 2007 bahwa penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Novita, 2008 dalam Setyoariandi, 2010). Menurut, Almilia dan Wijayanto (dalam Wijayanti, 2012), perusahaan yang memiliki kategori investasi oleh asing diduga lebih memperhatikan tanggung jawab lingkungannya dibandingkan yang investor dalam negeri. Beberapa negara asing seperti Jepang telah mewajibkan

pengungkapan tanggung jawab lingkungannya sedangkan di Indonesia hal tersebut masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Menurut Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Mahmud dan Djakman, 2008 menyatakan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui, negara-negara luar terutama Eropa dan *United State* merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial; seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.

Menurut Susanto (1992); Fitriani (2001), dalam Almilia dan Retrinasari (2007:6) ada beberapa alasan perusahaan yang memiliki status permodalan asing lebih banyak pengungkapan lingkungannya. Pertama, mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya diluar negeri. Kedua, mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga terdapat permintaan informasi yang lebih besar dari pelanggan, pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008).

d. Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Murwaningsari, 2009). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Nurkheim, 2009). Menurut Sudarno (2004:7) dampak yang ditimbulkan perusahaan besar lebih luas dan

menjadi perhatian banyak pihak sehingga pertanggungjawaban lingkungan berperan dalam menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholder*. Menurut Winarno (2007) perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap lingkungan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan berdampak positif bagi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang (Nurkhim, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Haryanto (2009) penelitian ini berjudul *environmental disclosure* dalam laporan tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan dan *environmental performance* terhadap variabel dependen *environmental disclosure*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan *environmental performance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup serta secara parsial *environmental performance* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup. Disisi lain penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan secara parsial variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup.

Sudarno (2004) penelitian ini berjudul pengungkapan tanggung jawab lingkungan dan hubungannya dengan ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis tentang hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan kuantitas dan kualitas pengungkapan tanggung jawab lingkungan khususnya seluruh sampel dan kelompok *high-profile*, tetapi untuk kelompok industri *low-profile* tidak mendukung hipotesis tersebut, oleh karena itu kita tidak dapat mengeneralisir terhadap semua jenis industri bahwa semakin besar perusahaan

cenderung memberikan pengungkapan lebih banyak karena hal itu tidak berlaku untuk kelompok industri *low profile*.

Suratno, Darsono, dan Mutmainah (2006) menguji pengaruh *environmental performance* terhadap *environmental disclosure* dan *economic performance*. Pengukuran pengungkapan lingkungan didasarkan pada 8 *item* indikator oleh Pattern (dalam Suratno, Darsono, dan Mutmainah, 2006). Sampel penelitian ini sebanyak 19 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan mengikuti PROPER selama tahun 2002-2005. Pengujian hipotesis pertama mengindikasikan bahwa *environmental performance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *environmental disclosure*. Hipotesis kedua juga mengindikasikan bahwa *environmental performance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *economic performance*.

Suhardjanto dan Miranti (2009) penelitian ini berjudul Indonesia environmental reporting index dan karakteristik perusahaan. Hasil dari penelitian ini bahwa profitabilitas dan jenis industri berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* serta variabel *size*, *leverage*, dan provisi *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Wjayanti (2012) penelitian ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas, regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan serta status pemodal, dan sektor industri berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

Lindrianasari (2007) penelitian ini berjudul hubungan antara kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan lingkungan dengan kinerja ekonomi perusahaan di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah kinerja lingkungan, kinerja ekonomi serta variabel dependen yang digunakan adalah kualitas pengungkapan lingkungan, dan kinerja ekonomi. Hasil penelitian ini

adalah bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara kualitas pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan. Selain itu terdapat hubungan positif antara kinerja ekonomi dengan kinerja lingkungan serta terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja ekonomi dengan kualitas pengungkapan lingkungan.

Karim, Lacina dan Rutledge (2006) penelitian ini berguna untuk menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dan luas pengungkapan. Variabel independen : *amount of foreign concentration, profitability, leverage, future need for debt financing, firm size, earning volatility, industry membership, institutional blockholder stock ownership*. Variabel dependen : *levels of environmental disclosure*. Hasil penelitian ini bahwa *institutional blockholder stock ownership, profitability, future need for debt financing, dan leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan *foreign concentration, industry membership dan earnings volatility* memiliki luas pengungkapan lingkungan yang rendah.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hariyanto (2009)	<i>Environmental Disclosure</i> dalam Laporan Tahunan	Variabel Independen : <i>Environmental Performance</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan Variabel dependen: <i>Environmental disclosure</i>	1. Ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan <i>environmental performance</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi lingkungan. 2. Secara parsial hanya <i>environmental performance</i> berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup.
2.	Sudarno (2004)	Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan dan Hubungannya dengan Ukuran Perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab	Variabel independen: Ukuran Perusahaan Variabel dependen: Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan	1. Terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan kuantitas dan kualitas pengungkapan tanggungjawab lingkungan khususnya untuk

		lingkungan menggunakan metode <i>content analysis</i>		seluruh sampel dan kelompok <i>high-profile</i> tetapi untuk kelompok industri <i>low-profile</i> tidak mendukung hipotesis.
3.	Suratno, Darsono, Mutmainah (2007)	Pengaruh <i>Environmental Performance</i> Terhadap <i>Environmental Disclosure</i> dan <i>Economic Performance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004). 8 item <i>environmental disclosure</i> yang digunakan dalam penelitian dan diukur dengan <i>disclosure scoring</i>	Variabel independen: <i>Environmental performance</i> Variabel dependen: <i>Environmental disclosure, economic performance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Environmental performance</i> berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>environmental disclosure</i>. 2. <i>Environmental performance</i> berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>economic performance</i>.
4.	Suhardjanto dan Miranti (2009)	Indonesia <i>Environmental Reporting Index</i> dan	Variabel independen: Ukuran perusahaan,	1. Profitabilitas, dan tipe industri berpengaruh signifikan positif

		Karakteristik Perusahaan	<i>leverage</i> , profitabilitas, cakupan operasional perusahaan. Variabel dependen: <i>environmental disclosure (IER)</i> Variabel kontrol : Tipe industri, Komposisi dewan komisaris independen	terhadap pengungkapan lingkungan hidup perusahaan. 2. <i>Leverage</i> , cakupan operasional perusahaan dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan perusahaan.
5.	Wijayanti (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab lingkungan dalam laporan tahunan	Variabel independen: Profitabilitas, regulasi, status permodalan, sektor industri dan ukuran perusahaan variabel dependen: tingkat pengungkapan tanggungjawab lingkungan	1. Profitabilitas, regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggungjawab lingkungan. 2. Status permodalan dan sektor industri berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggungjawab lingkungan. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggungjawab lingkungan.

6.	Lindrianasari(2007)	Hubungan antara kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan lingkungan dengan kinerja ekonomi perusahaan di Indonesia	Variabel independen: Kinerja lingkungan, kinerja ekonomi Variabel dependen:kualitas pengungkapan lingkungan, kinerja ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat hubungan yang positif signifikan antara kualitas pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan. 2. Terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja ekonomi dengan kinerja lingkungan. 3. Terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja ekonomi dengan kualitas pengungkapan lingkungan.
7.	Karim, Lacina dan Rutledge (2006)	Menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dan luas pengungkapan	Variabel independen : <i>amout of foreign concentration, profitability, leverage, future need for debt financing, firm size, earning volatility, industry membership, institutional blocholder stock ownership</i> Variabel dependen : <i>levels of environmental disclosure</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel <i>institutional blocholder stock ownership, profitability, future need for debt financing, dan leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 2. <i>Foreign concentration, industry membership</i> dan <i>earnings volatility</i> memiliki luas

				pengungkapan lingkungan yang rendah.
--	--	--	--	--------------------------------------

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu bahwa variabel-variabel yang digunakan berbeda satu sama lainnya untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor terhadap pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Tetapi juga terdapat variabel yang sama digunakan oleh Hariyanto (2009), Sudarno (2004), Suratno, Darsono, Mutmainah (2007), Suhardjanto dan Miranti (2009), Wijayanti (2012) dan Lindrianasari (2007) yang menunjukkan hasil yang berbeda pada penelitiannya yaitu ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Perbedaan hasil penelitian tersebut didasarkan pada perbedaan obyek yang diteliti, perbedaan periode pengamatan, periode jumlah sampel yang digunakan serta pengukuran variabelnya.

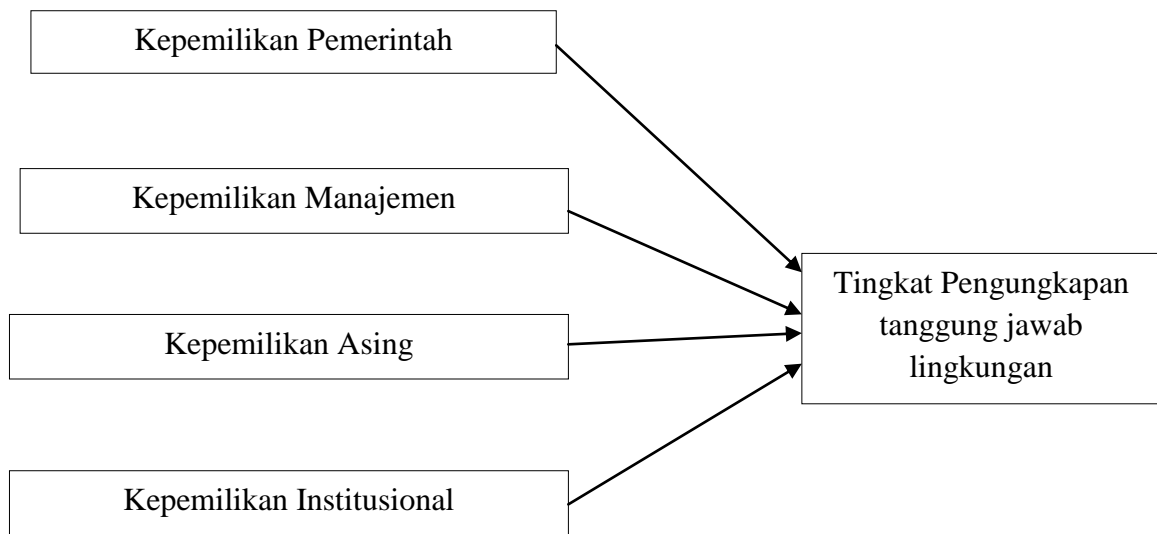
Berdasarkan variabel yang ada maka penelitian ini menggunakan salah satu variabel pada penelitian Wijayanti (2012) yaitu status permodalan yang akan lebih diperinci atau didetailkan menjadi struktur kepemilikan sebagai variabel dalam penelitian ini. Struktur kepemilikan pada penelitian ini terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional karena kepemilikan saham perusahaan mendorong manajemen untuk menekankan pentingnya analisis perilaku perusahaan dengan memperhatikan lingkungan yang diharapkan agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan teori legitimasi dan peraturan pemerintah sehingga perusahaan dapat melanjutkan kegiatan usaha dan dapat bertahan hidup untuk menghindari kerugian yang dialami perusahaan.

Selain itu struktur kepemilikan menjadi variabel penelitian juga berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanam Modal bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak

terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini ingin menguji kembali tingkat pengungkapan tanggungjawab lingkungan pada periode pengamatan 2009-2011. Penelitian ini dalam pengukuran variabel didasarkan pada pedoman GRI (2006).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis menjadi suatu bentuk pola pemikiran hubungan antar variabel dalam sebuah penelitian. Berdasarkan telah teoritis diatas maka model penelitian yang dibangun untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan adalah sebagai berikut :



Gambar 6.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Kepemilikan Pemerintah adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki pemerintah. Fransiska (2012) menyatakan kepemilikan saham oleh pemerintah menyebabkan perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya harus selaras dengan kepentingan. Tekanan pemerintah dan publik yang kuat membuat perusahaan ini harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Darwin (dalam Machmud dan Djakman, 2008) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, resposibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders lainnya. Guthrie dan Parker (dalam Nurkhim, 2009) menyarankan bahwa organisasi mengungkapkan kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi atas usaha (Hui dan Bowrey dalam Nurkhim, 2009).

Pemerintah berkepentingan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku agar kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu (Satyo dalam Suaryana, 2010). Kepemilikan pemerintah mendorong pengungkapan pertanggungjawab lingkungan karena telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus

mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Ghozali dan Chairir dalam Iryanie, 2009). Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

2.4.2 Pengaruh kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka (Faizal, 2004). Selain itu menurut Soesetio (2008) kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* karena dengan memiliki saham perusahaan, diharapkan manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi dari kepemilikan saham.

Salah satu cara bagi manajer untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dalam laporan tahunan, strategi bisnis manajemen dan kinerja perusahaan dengan lebih lengkap, termasuk kinerja lingkungan guna pengambilan keputusan (Sudarno, 2004). Menurut Winarno (2007) perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap lingkungan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Guthrie dan Parker (dalam Nurkhim, 2009) menyarankan bahwa organisasi mengungkapkan kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi atas usaha (Hui dan Bowrey dalam Nurkhim, 2009). Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan

sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs, 1990; Dowling dan Pfeffer, 1975; O' Donovan, 2002; dalam Chariri 2008). Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Novita, 2008 dalam Setyoariandi, 2010). Menurut, Almilia dan Wijayanto (dalam Wijayanti, 2012), perusahaan yang memiliki kategori investasi oleh asing diduga lebih memperhatikan tanggung jawab lingkungannya dibandingkan yang investor dalam negeri. Beberapa negara asing seperti Jepang telah mewajibkan pengungkapan tanggung jawab lingkungannya sedangkan di Indonesia hal tersebut masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Menurut Susanto (1992); Fitriani (2001), dalam Almilia dan Retrinasari (2007:6) ada beberapa alasan perusahaan yang memiliki status permodalan asing lebih banyak pengungkapan lingkungannya. Pertama, mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya diluar negeri. Kedua, mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga terdapat permintaan informasi yang lebih besar dari pelanggan, pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008). Hal ini yang menjadikan kepemilikan asing dalam perusahaan bisa mendorong

pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Murwaningsari, 2010). Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain (Tarjo dalam Dwi K., 2012). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Nurkhim, 2009). Hal ini senada juga dikemukakan oleh Shleifer dan Vishny dalam Barnae dan Rubin (2005) dalam machmud dan Djakman (2008) institutional shareholders, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif memantau pengambilan keputusan perusahaan. Untuk itu perusahaan dituntut menyediakan informasi mengenai kinerja kepada publik (Dunlap dan Scare dalam Lindrianasari, 2007).

Preston (dalam Lindrianasari, 2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan melakukan pengungkapan yang tinggi memposisikan mereka sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas yang berguna dan kualitas pengungkapan ini juga didorong legitimasi terhadap masyarakat. Menurut Winarno (2007) perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap lingkungan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk menekankan pentingnya analisis perilaku dengan memperhatikan lingkungan

yang diharapkan agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan teori legitimasi. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999:147). Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 dengan mengakses situs www.idx.co.id dan masuk dalam kriteria penilaian PROPER periode 2008-2009, 2009-2010 dan 2010-2011 dengan mengakses situs www.proper.menlh.go.id. Sumber lain yang mendukung penelitian ini melalui kajian literatur/studi pustaka berupa jurnal, artikel, buku dan penelitian-penelitian sebelumnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota dari populasi disebut dengan elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 1999:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009, 2010, dan 2011 serta masuk dalam kriteria penilaian PROPER periode 2008-2009, 2009-2010 dan 2010-2011.

Sampel adalah sebagian dari elemen populasi sedangkan subyek adalah anggota sampel (Indriantoro dan Supomo, 1999:115). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel nonprobabilitas (*nonprobability sampling methods*) melalui kriteria *purposive sampling*, yaitu kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan tersebut termasuk dalam kriteria penilaian PROPER periode 2008-2009, 2009-2010 dan 2010-2011.
- b. Perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009, 2010, dan 2011.

- c. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan tahunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2009, 2010 dan 2011.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

Berdasarkan telah daftar pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Independen

Variabel independen/bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 1999:63). Penelitian ini variabel independennya adalah sebagai berikut :

a. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham pemerintah Indonesia. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham perusahaan. Metode pengukuran diatas berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh Amran dan Devi (dalam Diba, 2012).

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan (Faizal, 2004). Pengukuran pengaruh kepemilikan manajemen terhadap pertanggungjawaban lingkungan menggunakan presentase saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus : (Dwi K., 2012)

$$MO = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Total jumlah saham}}$$

c. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham pihak/entitas asing (luar negeri). Besarnya saham pihak/entitas asing diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham asing terhadap total saham perusahaan. Metode pengukuran diatas berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh Amran dan Devi (dalam Diba, 2012).

d. Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Murwaningsari, 2009). Proporsi kepemilikan Institusional diukur berdasarkan persentase kepemilikannya yaitu jumlah saham institusional terhadap jumlah saham yang beredar (Murwaningsari, 2009).

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 1999:63). Variabel dependen yang diukur pada penelitian ini adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang informasinya diperoleh dari data laporan tahunan. Selain itu indikator pengukuran tanggung jawab lingkungan membutuhkan *checklist* yang berisi *item-item* pengungkapan yang akan dicocokkan dengan pengungkapan dalam laporan tahunan.

Penilaian dan pelaporan tanggung jawab lingkungan dalam wacana akuntansi global dikenal dengan GRI/*Global Reporting Initiative*. Menurut Suhardjanto, Tower, dan Brown (dalam Wijayanti, 2012), GRI sebagai wacana pelaporan lingkungan untuk entitas dan *stakeholder* sebagai kontribusi perusahaan yang berkelanjutan. Bahkan dalam penelitiannya IER*indeks* yang mengacu pada GRI dianggap lebih tepat untuk mengimplemetasikan pelaporan lingkungan di Indonesia. Dalam penelitian ini GRI digunakan sebagai proksi pengungkapan lingkungan yang meliputi 9 aspek yaitu

material, energi, air, biodiversitas, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi dan keseluruhan dengan 30 *item* indikator (terlampir di lampiran 1).

Tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dilakukan dengan cara sebagai berikut (Wijayanti, 2012) :

- a. Memberi skor atau angka (1) untuk perusahaan yang telah melakukan pengungkapan lingkungan sesuai dengan *item-item* tersebut, sedangkan angka (0) diberikan bagi perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan
- b. Skor yang diperoleh setiap perusahaan akan dijumlahkan untuk mendapat skor total
- c. Menghitung tingkat pengungkapan lingkungan setiap perusahaan dengan cara membagi total skor yang diungkapkan dengan total skor GRI indeks, yakni :

$$TJL = \frac{\text{Total Skor yang digunakan}}{\text{Total skor GRI indeks}}$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data keadaan atau fenomena (Hasan, 2002).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square-OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier

tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimate-Blue*). Keadaan ini akan terjadi apabila beberapa asumsi klasik berikut ini dipenuhi (Ghozali, 2005):

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005) :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikoinier bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adana korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF (*variance inflation faktor*) dengan nilai sebagai berikut, (Ghozali, 2005):

- 1) Jika nilai VIF (*variance inflation faktor*) > 10 dan nilai *tolerance* $< 0,1$, maka ada kasus multikolinieritas
- 2) Jika nilai VIF (*variance inflation faktor*) < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$, maka tidak ada kasus multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sedangkan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot (Ghozali, 2005).

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya
- 2) Jika tidak ada yang menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada problem autokorelasi. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2011):

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicison	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TJL = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

TJL	: Tingkat Pengungkapan tanggung jawab lingkungan
a	: Konstanta
b ₁ -b ₄	: Koefisien Regresi
X ₁	: Kepemilikan Pemerintah
X ₂	: Kepemilikan Manajerial
X ₃	: Kepemilikan Asing
X ₄	: Kepemilikan Institusional
e	: Kesalahan Regresi

3.4.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:83). Bila terdapat nilai *adjusted* R^2 bernilai negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. (Gujarati, 2003 dalam Ghozali 2005): Kriteria pengujiannya sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $R^2 = 1$, maka *adjusted* $R^2 = R^2 = 1$
- 2) Jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted* $R^2 = (1 - k) / (n - k)$
- 3) Jika $k > 1$, maka *adjusted* R^2 akan bernilai negatif

3.4.5 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu model dalam pengujian regresi dan bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen dalam suatu model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengukuran hipotesis dilakukan dengan cara berikut (Ghozali, 2005):

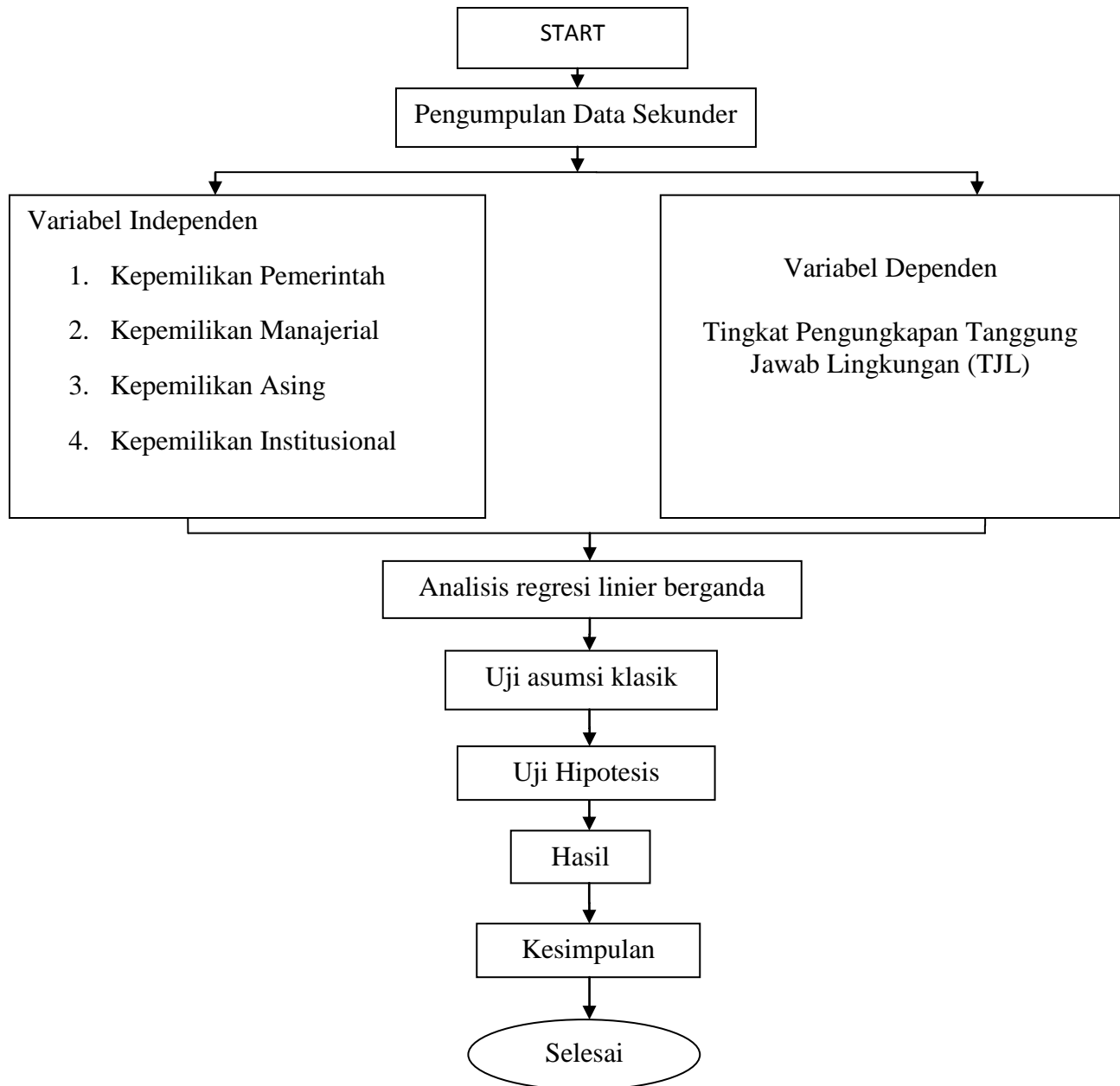
- 1) $H_0 : \beta = 0$, maka tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 2) $H_1 : \beta \neq 0$, maka ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 3) *Level of significant* (α) sebesar 5%
- 4) Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas):
 Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak berhasil ditolak
 Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 berhasil ditolak

3.4.6 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengukur apakah suatu variabel independen dalam suatu model penelitian mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Pengukuran hipotesis dilakukan dengan cara berikut (Ghozali, 2005):

- 1) $H_0 : \beta = 0$, maka tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 2) $H_1 : \beta \neq 0$, maka ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 3) *Level of significant* (α) sebesar 5%.
- 4) Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas):
 Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak berhasil ditolak
 Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 berhasil ditolak

3.5 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 7.1 Kerangka pemecahan masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam PROPER dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahunan 2009, 2010, dan 2011. Sampel penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam kriteria penilaian PROPER periode 2009-2011 serta telah menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) pada tahun 2009-2011. Distribusi pengambilan sampel penelitian ini yakni sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Pengambilan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2009, 2010, dan 2011	440
Perusahaan yang tidak termasuk kriteria penilaian PROPER periode 2008-2009, 2009-2010 dan 2010-2011	(405)
Perusahaan yang terdaftar di BEI dan PROPER 2009-2011	35
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunannya 2009, 2010 dan 2011	(5)
Perusahaan yang masuk kriteria penilaian PROPER dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011	30

Sumber : data diolah

Penelitian ini mengambil sampel data sebanyak 30 perusahaan melalui *purposive sampling* dengan periode selama tiga tahun terhitung tahun 2009, 2010, dan 2011. Sampel pengamatan yang digunakan sebanyak 90 laporan tahunan sebagai obyek penelitian. Perusahaan yang dijadikan sampel terlampir (lampiran 2).

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999:170). Pada penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sebanyak 90 sampel laporan tahunan selama tiga tahun yakni periode 2009-2011. Hasil deskriptif pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Y	0,033	0,500	0,23098	0,11459
X1	0,000	0,9003	0,06867	0,21345
X2	0,000	0,2500	0,00586	0,03066
X3	0,000	0,9632	0,29449	0,31779
X4	0,000	0,9720	0,33457	0,27034

Keterangan :

Y : TJL

X1 : Kepemilikan Pemerintah

X2 : Kepemilikan Manajerial

X3 : Kepemilikan Asing

X4 : Kepemilikan Institusional

Sumber: Lampiran 5 (data diolah)

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif tersebut maka berikut ini keterangan tiap-tiap variabel penelitian, yaitu:

a. Tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL)

Variabel TJL atau variabel terikat (Y) dari 90 sampel laporan tahunan perusahaan menunjukkan hasil bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan memiliki nilai minimum (terendah) sebesar 0,033 atau 3,3% terdapat pada perusahaan PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk (PSDN) pada tahun 2011 yang bergerak di industri karet dan tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dengan nilai maksimum (tertinggi) sebesar 0,500 atau 50% pada perusahaan PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2010 yang bergerak di industri tambang batu bara. TJL memiliki rata-rata sebesar 0,23098 atau 23,098% yang berarti rata-rata tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang masih rendah yakni jauh dari nilai maksimum maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk melakukan pengungkapan lingkungan masih rendah. Nilai standar deviasi sebesar 0,11459 atau 11,459% dibandingkan dengan rata-ratanya lebih kecil yang berarti bahwa data penelitian tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan masih kurang bervariasi selama periode penelitian.

b. Kepemilikan Pemerintah

Variabel Kepemilikan Pemerintah (X1) sebagai variabel bebas pertama memiliki rata-rata sebesar 0,06867 atau 6,867% dengan standar deviasi 0,21345 atau 21,345%. Kepemilikan pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 0,00 atau 0% yang berarti tidak adanya kepemilikan pemerintah atas saham perusahaan, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,9003 atau 90,03% pada perusahaan PT. Kimia Farma Tbk (KAEF) tahun 2009. Hal ini berarti rata-rata kepemilikan pemerintah yang dimiliki perusahaan sampel relatif rendah.

c. Kepemilikan Manajerial

Variabel Kepemilikan Manajerial (X2) sebagai variabel bebas memiliki rata-rata sebesar 0,00586 atau 0,586% dengan standar deviasi 0,03066 atau 3,066%. Hal ini berarti rata-rata kepemilikan manajerial yang dimiliki perusahaan sampel relatif rendah. Kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,00 atau 0% yang berarti tidak adanya kepemilikan manajerial atas saham perusahaan, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,2500 atau 25% merupakan Kepemilikan Manajemen pada PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk pada tahun 2011. Hal ini berarti rata-rata kepemilikan manajerial yang dimiliki perusahaan sampel relatif rendah.

d. Kepemilikan Asing

Variabel Kepemilikan Asing (X3) sebagai variabel bebas memiliki rata-rata sebesar 0,29449 atau 29,449% dengan standart deviasi 0,31779 atau 31,779%. Kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0,00 atau 0% yang berarti tidak adanya kepemilikan asing atas saham perusahaan, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,9632 atau 96,32% merupakan kepemilikan asing pada PT. Citra Tubindo Tbk (CTBN) pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan asing yang dimiliki perusahaan sampel cukup tinggi.

e. Kepemilikan Institusional

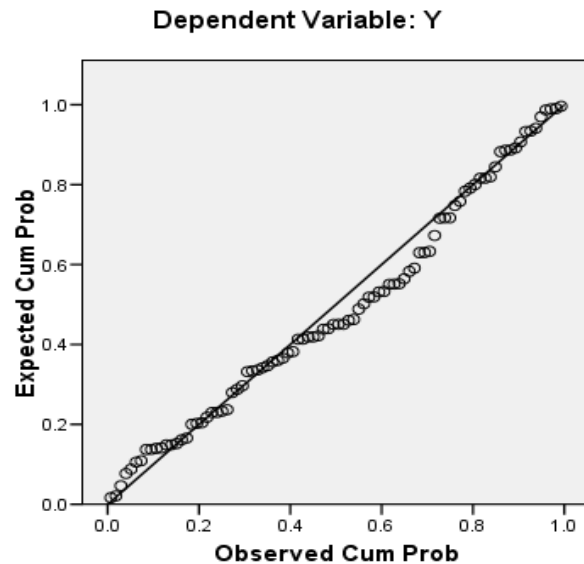
Variabel Kepemilikan Institusional (X4) memiliki rata-rata sebesar 0,33457 atau 33,457% dengan standart deviasi 0,27034 atau 27,034%. Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,00 atau 0% yang berarti tidak adanya kepemilikan institusional atas saham perusahaan, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,9720 atau 97,20% merupakan kepemilikan institusional pada PT. SMART Tbk (SMAR) pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan sampel rendah kepemilikannya.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi pada penelitian ini tepat dan signifikan. Uji Asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui normalitas data dan menghindari penyimpangan asumsi klasik dalam analisis regresi berganda sehingga tidak terjadi multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Adapun pengujian asumsi klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal sehingga membentuk satu garis diagonal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat alur penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Hasil output analisis grafik normal plot dengan SPSS yakni sebagai berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variabel : Y (TJL)

Sumber : lampiran 5 (data diolah)

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa data/titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diolah menunjukkan pola distribusi normal sehingga disimpulkan uji normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai dalam memprediksi besarnya pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Cara mendeteksi

multikolinieritas dengan menganalisis perhitungan nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2005:92). Hasil output analisis uji multikolinieritas dengan SPSS yakni sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,955	1,047	Tidak ada multikolinieritas
X2	0,991	1,009	Tidak ada multikolinieritas
X3	0,882	1,134	Tidak ada multikolinieritas
X4	0,858	1,165	Tidak ada multikolinieritas

Keterangan :

X1: Kepemilikan Pemerintah

X2: Kepemilikan Manajerial

X3: Kepemilikan Asing

X4: Kepemilikan Institusional

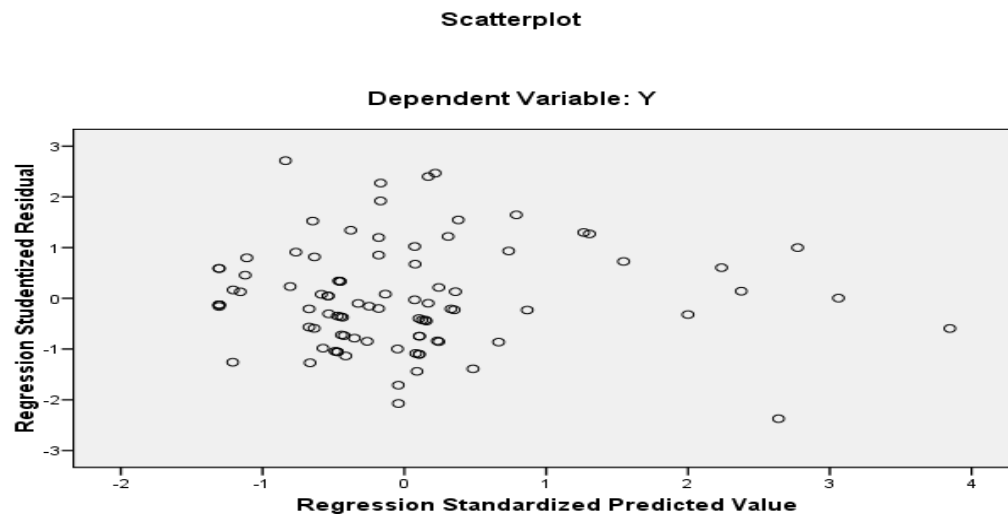
Sumber: Lampiran 5 (data diolah)

Berdasarkan hasil tabel yakni dari perhitungan nilai tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang kurang dari 0,10 sehingga tidak ada korelasi antar variabel bebasnya yang nilainya lebih dari 95%. Selain itu berdasarkan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Jadi dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi pengamatan yang satu ke yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Cara mendeteksinya dapat diketahui dari ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105). Hasil output analisis uji heteroskedastisitas dengan SPSS yakni sebagai berikut :



Dependent Variabel : Y (TJL)

Sumber : lampiran 5 (data diolah)

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu dan titik-titik

tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:110). Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Adapun nilai Durbin-Watson tabel dengan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel (n) = 90 dan jumlah variabel independen (k) = 4 maka didapatkan nilai d_L sebesar 1,566 dan nilai d_u sebesar 1,751.

Hasil uji Durbin-Watson yang dilakukan didapatkan nilai sebesar 1,862 (lampiran 5). Berdasarkan uji autokorelasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model empiris yang dibangun telah memenuhi asumsi berdasarkan kriteria, yaitu tidak ada autokorelasi jika $d_u < d < 4-d_u$ atau $1,751 < 1,862 < 2,249$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga uji autokorelasi telah terpenuhi.

4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan pada perusahaan yang terdaftar di PROPER dan BEI periode 2009-2011. Hasil uji regresi linier berganda, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi linier Berganda

Variabel	Koefisien Tidak Terstandardisasi		Koefisien Terstandardisasi	T Hitung	Sig.	Hipotesis
	B	Std. Error	Beta			
Konstanta	0,145	0,022		6,628	0,000	
X1	0,240	0,049	0,447	4,926	0,000	H1 diterima
X2	0,188	0,333	0,050	0.564	0,575	H2 ditolak
X3	0,120	0,034	0,333	3.521	0,001	H3 diterima
X4	0,099	0,041	0,234	2.438	0,017	H4 diterima
R				=		0,575
<i>Adjusted R²</i>				=		0,299
<i>R Square</i>				=		0,330
<i>Standar Error of estimate</i>				=		0,095
Fhitung				=		10.473
Fsig				=		0
N				=		90

Keterangan :

Y : TJL

X1 : Kepemilikan Pemerintah

X2 : Kepemilikan Manajerial

X3 : Kepemilikan Asing

X4 : Kepemilikan Institusional

Sumber : Lampiran 5 (data diolah)

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,145 + 0,240X_1 + 0,188X_2 + 0,120X_3 + 0,099 X_4$$

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai *adjusted* R^2 yang digunakan saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena nilainya dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam suatu model (Ghozali, 2005:83). Semakin besar nilai *adjusted* R^2 , maka semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan data (tabel 4.5) diketahui bahwa besarnya *adjusted* R^2 adalah 0,299. Hal ini berarti 29,9% variasi variabel dependen yakni tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dapat dijelaskan oleh variabel independennya meliputi kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Sisanya ($100\% - 29,9\% = 70,1\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti dalam penelitian ini.

Standar Error of estimate (SEE) menunjukkan nilai 0,095 yang cukup kecil. Semakin kecil nilai SEE maka dapat disimpulkan bahwa model regresi semakin tepat untuk memprediksi variabel independen yaitu tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

4.5 Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil uji F (tabel 4.5) didapat hasil yaitu, tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga semua variabel bebas yakni kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel terikat yaitu tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Pada uji kelayakan model ini didapatkan bahwa model persamaan regresi tersebut telah layak diuji dan dinyatakan baik.

4.6 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengukur apakah suatu variabel independen dalam suatu model penelitian mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Pengukuran hipotesis dilakukan dengan ketentuan jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak berhasil ditolak, sedangkan probabilitas $< 0,05$ maka H_0 berhasil ditolak. Berdasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.5 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel kepemilikan pemerintah (X1) memiliki nilai t sebesar 4,926 dan nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan koefisien 0,240. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga kepemilikan pemerintah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL).
2. Variabel kepemilikan manajerial (X2) memiliki nilai t sebesar 0,564 dan sig $0,575 > 0,05$ dengan koefisien 0,188. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga kepemilikan manajerial secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL).
3. Variabel kepemilikan asing (X3) memiliki nilai t sebesar 3,521 dan sig $0,001 < 0,05$ dengan koefisien 0,120. Ini berarti variabel kepemilikan asing signifikan dan berarah koefisien positif. Hal ini berarti H_0 ditolak H_3 diterima sehingga kepemilikan asing secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL).
4. Variabel kepemilikan institusional (X4) memiliki nilai t sebesar 2,438 dan sig $0,017 < 0,05$ dengan koefisien 0,099. Hal ini berarti H_0 ditolak H_4 diterima sehingga kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL).

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan pemerintah diukur dari jumlah saham kepemilikan pemerintah terhadap total saham perusahaan. Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa H_1 diterima yang menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL) dengan besar probabilitas 0,000 atau lebih kecil dari *level of significance* 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan koefisien 0,240. Secara statistik nilai koefisien beta positif menunjukkan adanya pengaruh searah yang berarti semakin tinggi kepemilikan pemerintah semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Menurut Dwi K.(2012) Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan pemerintah akan lebih sensitif secara politik karena kegiatan-kegiatan pemerintah akan lebih diperhatikan publik. Pemerintah berkepentingan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku agar kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu (Satyo dalam Suaryana, 2010).

Selain itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan dari pemerintah maka perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah akan mendorong perusahaan melakukan dan melaporkan tanggung jawab lingkungan karena telah diatur oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak regulator memiliki kekuatan untuk menekan pihak perusahaan dalam meminimalisasikan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha mereka (Lindrianasari, 2007). Oleh karena itu semakin tinggi kepemilikan pemerintah semakin tinggi pula tanggung jawab lingkungan yang dilakukan dan dilaporkan suatu perusahaan sehingga disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tanggung jawab lingkungan jadi hipotesis pertama diterima.

4.7.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan manajerial diukur dari jumlah saham kepemilikan manajerial terhadap total saham manajerial. Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa H_2 ditolak yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL) dengan besar probabilitas 0,575 atau lebih besar dari *level of significance* 0,05 ($0,575 > 0,05$) dan koefisien 0,188. Dalam penelitian sebelumnya tidak ada yang melakukan penelitian mengenai kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan, tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian Hapsoro (2007) bahwa proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela dan ketidaktaatan pengungkapan wajib. Berdasarkan hasil signifikan bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh manajemen kurang memiliki kontribusi terhadap tingkat pengungkapan tanggung lingkungan. Hal ini di karenakan tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang lain.

4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan asing diukur dari jumlah saham kepemilikan asing terhadap total saham asing. Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa H_3 diterima yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing secara statistik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL) dengan besar probabilitas 0,001 atau lebih kecil dari *level of significance* 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan koefisien 0,120. Secara statistik nilai koefisien beta positif menunjukkan adanya pengaruh searah yang berarti semakin tinggi kepemilikan asing semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Karim, Lacina dan Rutledge (dalam Chairi, 2008) bahwa kepemilikan asing yang tinggi cenderung memiliki pengungkapan lingkungan lebih rendah. Karena perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan asing yang lebih tinggi lebih tertutup pada informasi pengungkapan lingkungan karena berada dibawah penyelidikan yang lebih cermat dari negara lain dan komunitas internasional (Karim, Lacina dan Rutledge, 2006).

Menurut, Almilia dan Wijayanto (dalam Wijayanti, 2012), perusahaan yang memiliki kategori investasi oleh asing diduga lebih memperhatikan tanggung jawab lingkungannya dibandingkan yang investor dalam negeri. Beberapa negara asing seperti Jepang telah mewajibkan pengungkapan tanggung jawab lingkungannya sedangkan di Indonesia hal tersebut masih bersifat sukarela (*voluntary*). Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Cormier, Magnan dan Van Velthoven dalam Chariri, 2008 bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap

pengungkapan lingkungan. Oleh karena itu semakin tinggi kepemilikan asing semakin tinggi pula pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

4.7.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa H_4 diterima yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL) dengan besar probabilitas 0,017 atau lebih kecil dari *level of significance* 0,05 ($0,017 < 0,05$) dan koefisien 0,099. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Karim, Lacina dan Rutledge (dalam Chairi, 2008) bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder*, menurut Ghozali dan Chariri (dalam Iryanie, 2009) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan pemerintah semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan, karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Ghozali dan Chairir dalam Iryanie, 2009).
2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Dalam penelitian sebelumnya tidak ada yang melakukan penelitian mengenai kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan, tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian Hapsoro (2007) bahwa proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela dan ketidaktaatan pengungkapan wajib. Berdasarkan hasil signifikan bahwa

perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh manajemen kurang memiliki kontribusi terhadap tingkat pengungkapan tanggung lingkungan. Hal ini dikarenakan tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang lain.

3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan asing secara statistik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Karim, Lacina dan Rutledge (dalam Chairi, 2008) bahwa kepemilikan asing yang tinggi cenderung memiliki pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Cormier, Magnan dan Van Velthoven (dalam Chariri, 2008) bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Oleh karena itu semakin tinggi kepemilikan asing semakin tinggi pula pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
4. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian Karim, Lacina dan Rutledge (dalam Chairi, 2008) bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

4.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang hanya 30 perusahaan dengan 90 laporan tahunan (*annual report*), dikarenakan adanya kesulitan memperoleh data *annual report* secara lengkap pada perusahaan.
2. Variabel independen di atas masih belum mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan didalam perusahaan secara keseluruhan.

4.3 Saran

Dari keterbatasan-keterbatasan diatas maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya memperpanjang periode pemangatan untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan untuk meneliti variabel lain diluar variabel penelitian ini yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L. S dan Retrinasari, I. (2007). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional*.
- Almilia, L.S. 2010. Pengaruh Order Effect dan Pola Pengungkapan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.
- Amirawati, D.A.R. 2012. *Analisis Pengungkapan Lingkungan Pada pemerintah daerah indonesia*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.
- Badjuri, Achmad. 2011. Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Perusahaan Manufaktur Dan Sumber Daya Alam Di Indonesia Corporate Governance Mechanism, Fundamental Factors, Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Of A Natural Resource And Manufactur Company In Indonesian. *Vol.3, No.1*.
- Bapepam dan LK. 2008. *Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 tentang Laporan Biro Administrasi Efek Sendiri. Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 317/BL/2008 tanggal 6 Agustus 2008*. Jakarta: Bapepam dan LK.
- Bapepam dan LK. 2012. *Peraturan Bapepam –LK Nomor : X.K.6 lampiran keputusan Nomor : Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Bapepam dan LK.
- Benefita. 2011. *PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan)*. [online]. <http://www.benefita.com/view.htm>. [21 september 2012].
- Chariri, A. 2008. Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.
- Diba, Farah. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Laporan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Laporan Tahunan Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Dwi K., Noviyanti. 2012. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada*

- Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia*). Skripsi. Jember : Universitas Jember.
- Faizal. 2004. Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi VII. Ikatan Akuntansi Indonesia*.
- Fransiska, Riski. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Laporan Tahunan*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Versi 19*. Semarang: Badan Penerbit UnDip.
- Hapsoro, Dody. 2007. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol 18, No. 2, Agustus 2007.
- Hasan, Zaini, M.. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. PPS UM.
- Hariyanto, E. 2009. Environmental Disclosure dalam Laporan Tahunan. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2) : 1-12.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N., dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indrayani, D. 2009. Analisis Hubungan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan PERSERO dan Perusahaan Perbankan Umum Swasta Nasional Go Public Periode 2007-2008. *Jurnal Universitas Gunadarma*.
- Iryanie, E. 2009. Komitmen Stakeholder Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

- Ja`far S, M., dan Arifah, D.A. 2006. Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan terhadap Public Environmental Reporting. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang*.
- Karim, K.E, Lacina, M.J, dan Rutledge, R. W.. 2006. The Association between Firm Characteristic and the level of Environmental Disclosure in Financial Statements Footnotes. *Advances in Environmental Accounting and Management. Vo. 3, pp77-109*.
- K, Noviyanti. D. 2012. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2009. *Laporan Hasil Penilaian PROPER 2009-2010*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2010. *Laporan Hasil Penilaian PROPER 2010-2011*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional Melalui PROPER*. Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kristanto, R. 2010. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Kustono, Alwan Sri. 2010. Mekanisme Kelola Korporat dan Perekayasa Laba di Perbankan Publik Indonesia. *Jurnal Universitas Jember*.
- Lindrianasari. 2007. Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 11 (2) : 1-14*.
- Machmud, N dan Djakman, C.D. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*Csr Disclosure*) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Simposium Akuntansi Nasional XI*.
- Munawir, S.2002. *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFW: Yogyakarta.

- Murwaningsari, E. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. *Jurnal Universitas Trisakti*.
- Nurkhim, 2009. Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Tesis Universitas Di Ponegoro*.
- Nuryaman. 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Simposium Akuntansi Nasional X*
- Puspita, M.D. 2005. *Pengaruh Faktor-faktor Karakteristik Non Keuangan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Pada Laporan Tahunan Emiten Pertambangan Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Rahajeng, R.G. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaab Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Semarang. Universitas di Ponegoro
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 106. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang 2007 Penanaman Modal*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 140. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat*

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Rini, Y.T. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Rochaety, E., Tresnati, R., Latief, A.M. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sarwono, J. 2009. *Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sembiring, E.R. 2005. Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal SNA VIII, Solo*.

Setyoriandi, K. 2010. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Soesetio, Yuli. 2008. Kepemilikan Manajerial dan Institusional, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.

Suaryana, A. 2010. Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Universitas Udayana*.

Sudarno. 2004. Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan dan Hubungannya dengan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 2 (2) : 1-17.

Suhardjanto, D., dan Miranti, L. 2009. Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 13 (1) : 1-17.

- Suratno, I.B., Darsono., Mutmainah, S. 2006. Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic performance. *Jurnal Simposium Nasional IX, Padang*.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE UGM Yogyakarta.
- Ulum, I. Ghazali, I. Dan Chariri, Anis. 2008. Intellectual Capital dan Kinerja keuangan perusahaan; Suatu Analisis Dengan Pendekatan Partial Least Squares. *Jurnal SNA*.
- Wibisono, Yusup. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Gresik.
- Widarjo, W. dan Bandi dan Hartoko, S. 2010. Pengaruh Ownership Retention, Investasi Dari Proceeds, dan Reputasi Auditor Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial dan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.
- Wijayanti, R.R. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Laporan Tahunan*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Winarno, W.A. 2007. Corporate Social Responsibility : Pengungkapan Biaya Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 5 (1) : 72-86.
- WALHI. 2011. *Pencemaran Lingkungan Naik 100%*, [Online], (<http://www.kbr68h.com/berita/nasional/1696-walhi-pencemaran-lingkungan-naik-100%>), [26 Desember 2011].

Lampiran 1. Indeks Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

No.	Kode	Indikator
		Aspek : Material
1	EN1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume
2	EN2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang
		Aspek: Energi
3	EN3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer
4	EN4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer
5	EN5	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi
6	EN6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
7	EN7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai
		Aspek: Air
8	EN8	Total pengambilan air per sumber
9	EN9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air
10	EN10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang
		Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)
11	EN11	Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi
12	EN12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)
13	EN13	Perlindungan dan Pemulihan Habitat
14	EN14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
15	EN15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi

lanjutan

No.	Kode	Indikator
		Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah
16	EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat
17	EN17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat
18	EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya
19	EN19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat
20	EN20	NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat
21	EN21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan
22	EN22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.
23	EN23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.
24	EN24	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya
25	EN25	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
		Aspek: Produk dan Jasa
26	EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
27	EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.
		Aspek: Kepatuhan
28	EN28	Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
		Aspek: Pengangkutan/Transportasi
29	EN29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
		Aspek: Menyeluruh
30	EN30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.

Sumber: GRI Indikator Kinerja Lingkungan 2006

Lampiran 2

No	Nama Perusahaan	Kode Emiten	Jenis Industri
1	PT. Indo Acidatama Tbk.	SRSN	Industri Kimia
2	PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	INTP	Semen
3	PT. Holcim Indonesia Tbk.	SMCB	Semen
4	PT. Semen Gresik Tbk.	SMGR	Semen
5	PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	UNIC	Petrokimia
6	PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	INKP	Pulp & Kertas
7	PT. Kimia Farma Tbk	KAEF	Farmasi
8	PT. Adaro Energy Tbk	ADRO	Tambang Batu Bara
9	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA	Petrokimia
10	PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk	ANTM	Tambang Mineral
11	PT. Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP	Minak Kelapa
12	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk	PSDN	Karet
13	PT. Budi Acid Jaya Tbk	BUDI	Tapioka
14	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	Ayam Beku
15	PT. Suparma Tbk	SPMA	Kertas
16	PT. SMART Tbk	SMAR	Sawit
17	PT. Argo Pantes Tbk	ARGO	Tekstil
18	PT. Kalbe Farma Tbk	KLBF	Farmasi
19	PT. Citra Tubindo Tbk	CTBN	Pelapisan Logam
20	PT. Tunas Baru Lampung Tbk	TBLA	Sawit
21	PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	KBRI	Kertas
22	PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk	SULI	Plywood
23	PT. Unitex Tbk	UNTX	Tekstil
24	PT. Lippo Cikarang Tbk	LPCK	Kawasan Industri
25	PT. Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	Petrokimia
26	PT. Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	Pelapisan Logam
27	PT. Fajar Surya Wisesa Tbk	FASW	Kertas
28	PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk	UNSP	Karet
29	PT. Medco Energi Internasional Tbk	MEDC	Ep Migas
30	PT. Unilever indonesia	UNVR	Consumer Goods

Lampiran 3

TAHUN	Kode Emiten	PEMERINTAH	MANAJERIAL	ASING	INSTITUSIONAL	TJL
2009	SRSN	0,0000	0,0000	0,3521	0,4953	0,133
	INTP	0,0000	0,0000	0,5100	0,1303	0,367
	SMCB	0,0000	0,0000	0,9096	0,0000	0,233
	SMGR	0,5101	0,0000	0,2490	0,0000	0,333
	UNIC	0,0000	0,0000	0,1011	0,6571	0,200
	INKP	0,0000	0,0000	0,0000	0,5272	0,133
	KAEF	0,9003	0,0000	0,0000	0,0000	0,233
	ADRO	0,0000	0,0861	0,0581	0,4391	0,467
	TPIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,7793	0,200
	ANTM	0,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,300
	SIMP	0,0000	0,0000	0,9000	0,1000	0,167
	PSDN	0,0000	0,0025	0,7500	0,1740	0,200
	BUDI	0,0000	0,0000	0,0000	0,5140	0,167
	CPIN	0,0000	0,0000	0,0000	0,5545	0,100
	SPMA	0,0000	0,0000	0,4070	0,4460	0,133
	SMAR	0,0000	0,0000	0,0000	0,9521	0,267
	ARGO	0,0000	0,0000	0,1826	0,3490	0,167
	KLBF	0,0000	0,0000	0,0000	0,5675	0,267
	CTBN	0,0000	0,0000	0,8092	0,0000	0,233
	TBLA	0,0000	0,0005	0,0000	0,5785	0,167
	KBRI	0,0000	0,0000	0,0000	0,3333	0,200
	SULI	0,0000	0,0000	0,0541	0,5174	0,200
	UNTX	0,0000	0,0001	0,6937	0,0000	0,167
	LPCK	0,0000	0,0000	0,0000	0,4873	0,100
	AMFG	0,0000	0,0000	0,4386	0,4068	0,133
	NIKL	0,0000	0,0014	0,5500	0,2500	0,300
	FASW	0,0000	0,0000	0,0000	0,7570	0,400
	UNSP	0,0000	0,0000	0,1666	0,1096	0,200
	MEDC	0,0000	0,0000	0,5070	0,0030	0,333
	UNVR	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,167

Tahun	Kode Emiten	PEMERINTAH	MANAJERIAL	ASING	INSTITUSIONAL	TJL
2010	SRSN	0,0000	0,0000	0,3521	0,5011	0,100
	INTP	0,0000	0,0000	0,5100	0,1303	0,333
	SMCB	0,0000	0,0000	0,9258	0,0000	0,400
	SMGR	0,5101	0,0000	0,1053	0,0293	0,400
	UNIC	0,0000	0,0000	0,1011	0,6571	0,267
	INKP	0,0000	0,0000	0,0000	0,5272	0,133
	KAEF	0,9002	0,0000	0,0000	0,0000	0,267
	ADRO	0,0000	0,0816	0,0000	0,4391	0,500
	TPIA	0,0000	0,0000	0,0000	0,7842	0,133
	ANTM	0,6500	0,0000	0,000	0,0000	0,367
	SIMP	0,0000	0,0000	0,9000	0,1000	0,133
	PSDN	0,0000	0,0000	0,5470	0,1740	0,133
	BUDI	0,0000	0,0000	0,0000	0,5120	0,200
	CPIN	0,0000	0,0000	0,0000	0,5553	0,167
	SPMA	0,0000	0,0000	0,4070	0,4460	0,133
	SMAR	0,0000	0,0000	0,0000	0,9521	0,200
	ARGO	0,0000	0,0017	0,1826	0,3639	0,133
	KLBF	0,0000	0,0000	0,0000	0,5664	0,267
	CTBN	0,0000	0,0000	0,9632	0,0350	0,133
	TBLA	0,0000	0,0005	0,0000	0,5664	0,200
	KBRI	0,0000	0,0000	0,5913	0,0000	0,200
	SULI	0,0000	0,0000	0,2129	0,3106	0,233
	UNTX	0,0000	0,0001	0,6937	0,0000	0,067
	LPCK	0,0000	0,0000	0,0000	0,4220	0,133
	AMFG	0,0000	0,0000	0,4386	0,4080	0,167
	NIKL	0,0000	0,0004	0,5500	0,2500	0,333
	FASW	0,0000	0,0000	0,0000	0,7574	0,233
	UNSP	0,0000	0,0000	0,1710	0,1306	0,267
MEDC	0,0000	0,0000	0,5070	0,0018	0,367	
UNVR	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,200	

Tahun	Kode Emiten	PEMERINTAH	MANAJERIAL	ASING	INSTITUSIONAL	TJL
2011	SRSN	0,0000	0,0000	0,3521	0,5011	0,067
	INTP	0,0000	0,0000	0,5100	0,1303	0,300
	SMCB	0,0000	0,0000	0,9146	0,0000	0,267
	SMGR	0,5101	0,0000	0,0000	0,0000	0,400
	UNIC	0,0000	0,0000	0,1011	0,6573	0,200
	INKP	0,0000	0,0000	0,0000	0,5272	0,200
	KAEF	0,9003	0,0000	0,0000	0,0000	0,200
	ADRO	0,0000	0,0816	0,0000	0,4391	0,333
	TPIA	0,0000	0,0001	0,3552	0,5935	0,167
	ANTM	0,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,300
	SIMP	0,0000	0,0000	0,7200	0,0640	0,233
	PSDN	0,0000	0,2500	0,5470	0,1739	0,033
	BUDI	0,0000	0,0000	0,0000	0,5104	0,200
	CPIN	0,0000	0,0000	0,0000	0,5553	0,100
	SPMA	0,0000	0,0000	0,4070	0,4460	0,167
	SMAR	0,0000	0,0000	0,0000	0,9720	0,200
	ARGO	0,0000	0,0017	0,1826	0,3638	0,133
	KLBF	0,0000	0,0000	0,0000	0,4797	0,200
	CTBN	0,0000	0,0000	0,8092	0,0000	0,167
	TBLA	0,0000	0,0005	0,0000	0,5428	0,100
	KBRI	0,0000	0,0000	0,3469	0,2142	0,133
	SULI	0,0000	0,0000	0,2174	0,3106	0,133
	UNTX	0,0000	0,0001	0,6937	0,000	0,033
	LCK	0,0000	0,0000	0,0000	0,4220	0,167
	AMFG	0,0000	0,0000	0,4368	0,4082	0,200
	NIKL	0,0000	0,0004	0,5500	0,2500	0,233
	FASW	0,0000	0,0000	0,0000	0,7574	0,433
	UNSP	0,0000	0,0000	0,4392	0,0282	0,233
MEDC	0,0000	0,0000	0,5742	0,0077	0,200	
UNVR	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,267	

Lampiran 4

No.	Indikator	2009														
		SRSN	INTP	SMCB	SMGR	UNIC	INKP	KAEF	ADRO	TPIA	ANTAM	SIMP	PSDN	BUDI	CPIN	SPMA
		Aspek : Material														
1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Aspek: Energi																
3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Aspek: Air																
8	Total pengambilan air per sumber	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Kepatuhan															
28	Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Aspek: Pengangkutan/Transportasi															
29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Menyeluruh															
30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total skor tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan		4	11	7	10	6	4	7	14	6	9	5	6	5	3	4
Indeks kelengkapan pengungkapan		0,1333333	0,3666667	0,2333333	0,3333333	0,2	0,1333333	0,2333333	0,4666667	0,2	0,3	0,1666667	0,2	0,1666667	0,1	0,1333333

11	Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13	Perlindungan dan Pemulihan Habitat	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	
14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	
15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah																
16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	

28	Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Aspek: Pengangkutan/Transportasi															
29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Menyeluruh															
30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total skor tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan	8	5	8	7	5	6	6	5	3	4	9	12	6	10	5
	Indeks kelengkapan pengungkapan	0,2666667	0,1666667	0,2666666	0,2333333	0,1666666	0,2	0,2	0,1666666	0,1	0,1333333	0,3	0,4	0,2	0,3333333	0,1666667

No.	Indikator	2010														
		SRSN	INTP	SMCB	SMGR	UNIC	INKP	KAEF	ADRO	TPIA	ANTAM	SIMP	PSDN	BUDI	CPIN	SPMA
		Aspek : Material														
1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Aspek: Energi																
3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Aspek: Air																
8	Total pengambilan air per sumber	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)																

11	Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Perlindungan dan Pemulihan Habitat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah																
16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Menyeluruh															
30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Total skor tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan		3	10	12	12	8	4	8	15	4	11	4	4	6	5	4
Indeks kelengkapan pengungkapan		0,1	0,333	0,4	0,4	0,267	0,133	0,267	0,5	0,1333	0,367	0,133	0,1333	0,2	0,1667	0,1333

28	Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Aspek: Pengangkutan/Transportasi															
29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Menyeluruh															
30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
Total skor tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan		6	4	8	4	6	6	7	2	4	5	10	7	8	11	6
Indeks kelengkapan pengungkapan		0,2	0,133333	0,266667	0,133333	0,2	0,2	0,233333	0,066667	0,133333	0,166667	0,333333	0,233333	0,266667	0,366667	0,2

	Aspek: Pengangkutan/Transportasi															
29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Menyeluruh															
30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Total skor tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan		2	9	8	12	6	6	6	10	5	9	7	1	6	3	5
Indeks kelengkapan pengungkapan		0,0667	0,3	0,2667	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3333	0,1667	0,3	0,233	0,03333	0,2	0,1	0,1667

No.	Indikator	2011														
		SMAR	AGRO	KLBF	CTBN	TBLA	KBRI	SULI	UNTX	LPCK	AMFG	NKIL	FASW	UNSP	MEDC	UNVR
	Aspek : Material															
1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
	Aspek: Energi															
3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Air															
8	Total pengambilan air per sumber	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

	Aspek: Pengangkutan/Transportasi															
29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aspek: Menyeluruh															
30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	Total skor tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan	6	4	6	5	3	4	4	1	5	6	7	13	7	6	8
	Indeks kelengkapan pengungkapan	0,2	0,1333 33	0,2	0,1666 67	0,1	0,133333	0,1333 33	0,033333	0,166667	0,2	0,233333	0,433333	0,233333	0,2	0,266667

Lampiran 5

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	90	.0000	.9003	.068679	.2134530
X2	90	.0000	.2500	.005862	.0306654
X3	90	.0000	.9632	.294494	.3177962
X4	90	.0000	.9720	.334572	.2703424
Y	90	.033	.500	.23098	.114596
Valid N (listwise)	90				

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	.23098	.114596	90
X1	.068679	.2134530	90
X2	.005862	.0306654	90
X3	.294494	.3177962	90
X4	.334572	.2703424	90

Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4
Pearson Correlation	Y	1.000	.464	.097	.209	.206
	X1	.464	1.000	.094	-.097	.189
	X2	.097	.094	1.000	-.011	.035
	X3	.209	-.097	-.011	1.000	-.342
	X4	.206	.189	.035	-.342	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.182	.024	.026
	X1	.000	.	.189	.181	.037
	X2	.182	.189	.	.457	.370
	X3	.024	.181	.457	.	.000
	X4	.026	.037	.370	.000	.
N	Y	90	90	90	90	90
	X1	90	90	90	90	90
	X2	90	90	90	90	90
	X3	90	90	90	90	90
	X4	90	90	90	90	90

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4 _a , X2, X1, X3	.	Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	.575 ^a	.330	.299	.095973	.330	10.473	4	85	.000	1.862

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.386	4	.096	10.473	.000 ^a
	Residual	.783	85	.009		
	Total	1.169	89			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.145	.022		6.628	.000					
	X1	.240	.049	.447	4.926	.000	.464	.471	.437	.955	1.047
	X2	.188	.333	.050	.564	.575	.097	.061	.050	.991	1.009
	X3	.120	.034	.333	3.521	.001	.209	.357	.313	.882	1.134
	X4	.099	.041	.234	2.438	.017	.206	.256	.216	.858	1.165

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X1	X2	X3	X4
1	1	2.464	1.000	.03	.04	.02	.04	.04
	2	.972	1.592	.01	.18	.60	.07	.00
	3	.865	1.688	.00	.52	.38	.06	.01
	4	.568	2.084	.01	.26	.00	.33	.24
	5	.131	4.330	.95	.00	.00	.50	.71

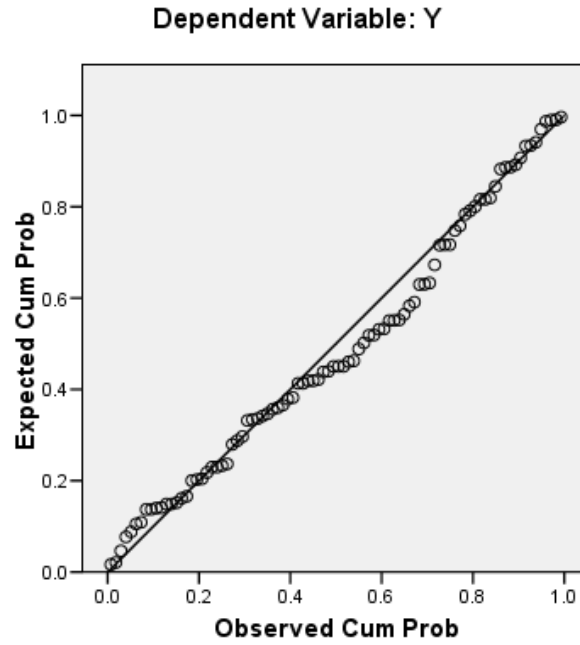
a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.14491	.48428	.23098	.065845	90
Std. Predicted Value	-1.307	3.847	.000	1.000	90
Standard Error of Predicted Value	.011	.083	.020	.010	90
Adjusted Predicted Value	.14190	.49641	.23197	.068951	90
Residual	-.204701	.257242	.000000	.093791	90
Std. Residual	-2.133	2.680	.000	.977	90
Stud. Residual	-2.373	2.715	-.003	1.010	90
Deleted Residual	-.253372	.263985	-.000991	.101057	90
Stud. Deleted Residual	-2.441	2.825	.000	1.024	90
Mahal. Distance	.221	65.359	3.956	7.662	90
Cook's Distance	.000	.435	.018	.057	90
Centered Leverage Value	.002	.734	.044	.086	90

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

